

INTEGRASI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL: STRATEGI MEMBANGUN MASYARAKAT INKLUSIF DAN TOLERAN

Widya Fazira

Universitas Medan Area, Indonesia

Email: fazira_wid@gmail.com

Wilda Afriani Batubara

Universitas Medan Area, Indonesia

Email: fazira_wid@gmail.com

Anwar Saputra Siregar

Universitas Medan Area, Indonesia

Email: fazira_wid@gmail.com

Abstrak: Pendidikan multikultural menjadi suatu keniscayaan dalam konteks kebinekaan masyarakat Indonesia yang plural dan heterogen. Sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara implisit memberikan ruang untuk penerapan pendidikan multikultural. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pendidikan multikultural diposisikan dalam sistem pendidikan nasional, serta mengidentifikasi problematika dan potensi pengembangannya. Metode yang digunakan dalam penulisan Tulisan ini adalah studi literatur (*library research*) dengan menganalisis dokumen perundang-undangan, artikel ilmiah, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan multikultural belum sepenuhnya terintegrasi secara sistemik, meskipun secara normatif telah mendapatkan legitimasi. Terdapat tantangan seperti intoleransi, diskriminasi, dan kurangnya pelatihan guru dalam perspektif multikultural. Kesimpulan Tulisan ini menekankan pentingnya strategi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengembangkan pendidikan multikultural yang kontekstual dengan kebutuhan Indonesia.

Kata Kunci: *Pendidikan, Multikultural, Keberagaman, Kurikulum, Toleransi*



PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter bangsa, terlebih dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk secara budaya, agama, suku, dan bahasa. Keberagaman ini menjadi tantangan sekaligus kekayaan dalam proses pendidikan nasional. Oleh karena itu, penting bagi sistem pendidikan nasional untuk mengakomodasi prinsip-prinsip multikultural sebagai dasar dalam membangun keharmonisan sosial. Multikulturalisme dalam pendidikan tidak hanya berbicara tentang pengenalan budaya, tetapi juga tentang penerimaan, penghormatan, dan penguatan nilai-nilai inklusivitas. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 secara tidak langsung mendukung penerapan nilai-nilai tersebut melalui asas keadilan, demokrasi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Namun dalam praktiknya, pendidikan di Indonesia masih cenderung bersifat homogen dan kurang sensitif terhadap realitas sosial yang beragam. Misalnya, narasi dominan dalam buku pelajaran kadang tidak mencerminkan keberagaman lokal. Oleh sebab itu, perlu ada upaya serius untuk memasukkan pendidikan multikultural ke dalam kurikulum dan strategi pembelajaran yang lebih luas. Pendidikan multikultural harus menjadi basis dalam membangun masyarakat yang toleran dan damai.

Konsep pendidikan multikultural berangkat dari pemahaman bahwa semua individu berhak mendapatkan pengakuan dan perlakuan setara dalam proses pendidikan, tanpa memandang latar belakang budaya, etnis, agama, atau bahasa (Yati et al. 2022). Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai tersebut sejatinya telah tertanam dalam falsafah Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Namun, implementasi nilai-nilai ini dalam sistem pendidikan masih menghadapi tantangan yang signifikan. Misalnya, masih ditemukan praktik diskriminatif di sekolah berdasarkan identitas kultural siswa. Selain itu, guru dan tenaga pendidik seringkali belum mendapatkan pelatihan khusus mengenai pendekatan pendidikan multikultural. Padahal, pendidikan seharusnya menjadi ruang netral yang mampu mengakomodasi keberagaman serta mendorong empati sosial. Lebih jauh lagi, pendidikan multikultural bukan sekadar muatan lokal, tetapi harus menjadi kerangka dasar dalam setiap jenjang pendidikan. Dalam banyak kasus, sekolah-sekolah cenderung mengabaikan potensi perbedaan budaya sebagai kekuatan untuk memperkaya proses belajar. Oleh karena itu, penting untuk melakukan reformulasi sistem pendidikan agar lebih berorientasi pada nilai-nilai



multikultural. Ini menjadi prasyarat bagi terciptanya masyarakat yang beradab dan saling menghormati.

Pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia tak lepas dari berbagai persoalan sosial yang mengemuka belakangan ini, seperti intoleransi, kekerasan berbasis agama, hingga diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan masih belum optimal dalam membentuk karakter peserta didik yang inklusif dan toleran (Bećirović and Bešlija 2018). Pendidikan semestinya menjadi media rekonsiliasi atas perbedaan yang ada dalam masyarakat. Namun, kenyataannya, institusi pendidikan sering kali menjadi ruang reproduksi nilai-nilai homogen dan dominatif. Dalam hal ini, pendidikan multikultural hadir sebagai solusi alternatif untuk merespon tantangan keberagaman yang ada. Selain itu, pendidikan multikultural juga dapat memperkuat identitas nasional melalui pendekatan yang menghargai perbedaan, bukan menyeragamkan. Hal ini dapat dilihat dalam studi-studi kasus di beberapa daerah yang berhasil menerapkan pendekatan multikultural dalam sistem pembelajaran mereka. Meski demikian, masih dibutuhkan kebijakan yang lebih kuat, pelatihan guru yang intensif, serta partisipasi masyarakat untuk mendukung keberlangsungan pendidikan multikultural. Karena itu, transformasi sistem pendidikan harus diarahkan untuk merespons dinamika sosial dan budaya Indonesia yang kompleks.

Tujuan dari penulisan Tulisan ini adalah untuk mengkaji bagaimana pendidikan multikultural diposisikan dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia serta mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangannya. Dengan pendekatan kajian teori dan studi pustaka, Tulisan ini berusaha menawarkan analisis yang mendalam dan kontekstual terkait urgensi pendidikan multikultural (Praditya and Iqbal 2024). Fokus pembahasan mencakup kerangka hukum seperti UU Sisdiknas 2003, dasar filosofis pendidikan multikultural, problematika dalam implementasi, serta bentuk pengembangan yang dapat dilakukan. Penting untuk memahami bahwa pendidikan multikultural bukan hanya sebatas materi ajar, tetapi juga paradigma berpikir dan pendekatan pedagogis yang menghargai keberagaman. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam upaya penguatan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan transformatif. Selain itu, Tulisan ini bertujuan membangun kesadaran bahwa pendidikan yang berbasis multikultural merupakan investasi jangka panjang dalam membentuk masyarakat yang damai dan harmonis. Dalam konteks



globalisasi dan arus informasi yang semakin cepat, pendidikan multikultural juga menjadi instrumen penting untuk menjaga integritas sosial dan nasional.

LANDASAN TEORI

Pendidikan multikultural merupakan sebuah pendekatan yang bertujuan menciptakan kesetaraan dalam pendidikan bagi semua kelompok budaya (Nuraini 2020). Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap ketimpangan sosial yang terjadi dalam sistem pendidikan konvensional yang cenderung mengutamakan budaya dominan. Pendidikan multikultural lahir dari kesadaran bahwa keberagaman dalam masyarakat adalah suatu keniscayaan yang harus dihargai dan diberdayakan. James Banks, tokoh utama dalam kajian pendidikan multikultural, menekankan pentingnya integrasi berbagai perspektif budaya dalam kurikulum. Dalam konteks Indonesia, pemikiran ini sejalan dengan Pancasila dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar kehidupan berbangsa. Kajian pendidikan multikultural mengajak peserta didik untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan sebagai kekuatan sosial (Nurasmawi and Ristiliana 2021). Dalam praktiknya, pendekatan ini dapat mendorong terbentuknya karakter inklusif dan toleran sejak usia dini. Oleh karena itu, pendidikan multikultural harus dipandang bukan sebagai pilihan, melainkan sebagai kebutuhan mendesak dalam sistem pendidikan Indonesia yang majemuk.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi landasan hukum utama dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. UU ini menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam pasal-pasalanya, termuat prinsip demokratis dan berkeadilan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan istilah pendidikan multikultural, nilai-nilai yang terkandung dalam UU tersebut mengandung semangat multikulturalisme (Rizqiyati et al. 2024). Dengan demikian, pendidikan multikultural dapat dianggap sebagai penjabaran praktis dari semangat UU Sisdiknas. Hal ini juga memperkuat legitimasi implementasi pendidikan multikultural dalam kurikulum, metode pembelajaran, serta pengembangan tenaga pendidik. Penanaman nilai-nilai inklusivitas melalui pendidikan menjadi alat strategis dalam membangun



tatanan sosial yang adil dan harmonis di tengah keberagaman bangsa Indonesia.

Pendidikan multikultural tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial masyarakat tempat ia diterapkan. Dalam masyarakat Indonesia yang sarat konflik horizontal, pendidikan menjadi arena strategis untuk meredam potensi disintegrasi. Teori konflik sosial seperti yang dikemukakan oleh Lewis Coser dan Randall Collins menunjukkan bahwa konflik sering kali timbul akibat dominasi satu kelompok atas kelompok lain dalam sistem sosial, termasuk dalam institusi pendidikan. Pendidikan multikultural hadir untuk mengatasi dominasi tersebut dengan memberikan ruang yang setara bagi berbagai identitas budaya. Pendekatan ini bukan hanya soal materi ajar, tapi mencakup cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Implementasi pendidikan multikultural yang efektif diyakini dapat menciptakan kohesi sosial, memperkuat identitas nasional, dan mengurangi ketegangan antar kelompok. Oleh karena itu, teori konflik memberi perspektif kritis bahwa pendidikan harus bersifat emansipatoris, tidak sekadar normatif. Pendidikan harus menjadi sarana pemberdayaan sosial, bukan alat pelanggeng ketimpangan (Rahmawati and Rahman 2019).

Teori konstruktivisme sosial juga menjadi kerangka penting dalam memahami pendidikan multikultural. Menurut Vygotsky, pembelajaran terjadi dalam konteks sosial dan dipengaruhi oleh interaksi antara individu dengan lingkungan sosialnya. Dalam hal ini, pendidikan multikultural mendorong siswa untuk belajar melalui interaksi lintas budaya, membangun pemahaman bersama atas perbedaan yang ada. Guru bukan sekadar penyampai materi, tetapi juga fasilitator dialog antarbudaya. Proses belajar tidak hanya berorientasi pada hasil akademik, tetapi juga pada pembentukan sikap dan nilai yang mendukung kehidupan sosial yang inklusif (Rasimin 2017). Pendidikan multikultural berbasis konstruktivisme memungkinkan peserta didik untuk menafsirkan pengalaman budaya mereka sendiri dan orang lain dalam kerangka yang lebih luas. Dengan pendekatan ini, siswa belajar tidak hanya untuk mengetahui, tetapi juga untuk menjadi bagian aktif dari masyarakat yang multikultural. Maka dari itu, teori ini menekankan pentingnya lingkungan belajar yang terbuka, dialogis, dan partisipatif sebagai dasar dalam menerapkan pendidikan multikultural secara efektif.

Karakteristik pendidikan multikultural meliputi inklusivitas, keterbukaan, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Dalam praktiknya, pendidikan ini berupaya menghapuskan segala bentuk



diskriminasi di sekolah – baik itu berdasarkan etnis, agama, gender, maupun status sosial. Pendidikan multikultural juga mendorong adanya kurikulum yang reflektif terhadap keanekaragaman, serta pendekatan pedagogis yang adaptif terhadap latar belakang siswa (Waskito and Rohman 2018). Salah satu ciri khasnya adalah keberpihakan terhadap kelompok yang termarjinalkan dalam sistem pendidikan. Misalnya, pelibatan budaya lokal dalam pembelajaran dapat meningkatkan rasa memiliki siswa terhadap lingkungan sekolah. Selain itu, pelatihan guru dalam perspektif multikultural menjadi syarat utama untuk memastikan pendidikan berjalan sesuai prinsip-prinsip keadilan sosial. Dengan demikian, karakteristik pendidikan multikultural bukan hanya teori, tetapi harus diterapkan secara konkret dalam semua aspek proses pendidikan. Ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan ruang belajar yang adil, nyaman, dan humanis.

Dalam konteks global, pendidikan multikultural juga menjadi strategi dalam menghadapi tantangan era globalisasi yang membawa arus nilai dan budaya asing. Globalisasi membuka akses informasi tanpa batas, tetapi juga berisiko mengikis identitas lokal apabila tidak dibarengi dengan penguatan nilai-nilai kebudayaan sendiri. Pendidikan multi-kultural berfungsi sebagai filter yang selektif dalam menyerap nilai-nilai global tanpa kehilangan akar budaya lokal. Ini penting agar generasi muda tidak terjebak dalam identitas semu yang tercerabut dari nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, pendidikan multikultural harus dirancang tidak hanya sebagai respons terhadap keberagaman internal, tetapi juga sebagai mekanisme adaptasi terhadap dunia yang terus berubah. Dalam kerangka ini, pendidikan multikultural tidak hanya relevan bagi Indonesia, melainkan juga menjadi bagian dari wacana pendidikan dunia yang mengedepankan perdamaian, toleransi, dan keadilan global. Pendidikan berbasis multikultural bisa menjadi jembatan menuju harmoni sosial baik di tingkat lokal maupun internasional.

METODE PENELITIAN

Unit analisis dalam Tulisan ini difokuskan pada sistem pendidikan nasional Indonesia dengan penekanan khusus pada penerapan pendidikan multikultural. Objek material meliputi dokumen-dokumen resmi negara seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003, kurikulum pendidikan nasional, serta berbagai kebijakan pendidikan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Selain itu, penulis juga menelaah peristiwa-peristiwa sosial yang berkaitan dengan keberagaman di



lingkungan sekolah dan institusi pendidikan, seperti kasus intoleransi, diskriminasi kultural, dan konflik sosial berbasis identitas. Kajian juga mencakup kelompok-kelompok yang menjadi bagian dari keragaman seperti siswa minoritas, guru dari berbagai latar belakang, serta komunitas lokal yang berinteraksi dengan lembaga pendidikan. Unit ini dipilih karena dianggap representatif dalam menggambarkan bagaimana realitas multikultural diterapkan, diakomodasi, atau bahkan diabaikan dalam sistem pendidikan (Prayoga 2022). Penelitian ini tidak berfokus pada satu lokasi fisik tertentu, melainkan lebih pada tataran kebijakan dan praktik pendidikan secara nasional. Dengan pendekatan ini, penulis berharap bisa menangkap gambaran menyeluruh terkait dinamika pendidikan multikultural di Indonesia saat ini.

Desain penelitian dalam penulisan Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Achmad, (2021); Liamputtong, (2020); Hennink et al., (2020); Sidiq et al., (2019), Mendefinisikan penelitian kualitatif menurut Yuliani, (2018), mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan bagian dari aspek penelitian yang dapat memberikan data informasi deskriptif yang berupa data tertulis ataupun data lisan (Nawangsih et al. 2022). Mestika, (2018) menyebutkan studi pustaka atau studi literatur, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Sipuan et al. 2022). Studi literatur dipilih karena Tulisan ini bertujuan mengkaji teori, kebijakan, dan praktik pendidikan multikultural secara mendalam dan kontekstual. Metode ini memungkinkan penulis untuk menganalisis data sekunder yang tersedia dalam berbagai bentuk, baik berupa buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dokumen pemerintah, hingga media daring yang kredibel. Melalui studi pustaka, penulis dapat mengkonstruksi pemahaman teoritis dan menganalisis dinamika pendidikan multikultural tanpa harus melakukan observasi lapangan secara langsung (Khair, Tang, and Mubarok 2024). Pendekatan ini sesuai untuk mengkaji isu-isu konseptual dan normatif yang menjadi dasar dari sistem pendidikan. Dalam konteks ini, Tulisan lebih menekankan pada analisis terhadap teks dan dokumen daripada pengumpulan data empiris di lapangan. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana wacana pendidikan multikultural terbentuk, berkembang, dan diterapkan dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu,



studi pustaka menjadi pilihan metode yang efektif dan relevan dalam menelaah isu ini secara akademik dan sistematis.

Proses analisis data dalam penulisan Tulisan ini diawali dengan pengumpulan informasi dari berbagai sumber tertulis, baik primer maupun sekunder. Sumber utama meliputi teks Undang-Undang Sisdiknas, kurikulum pendidikan nasional, serta naskah akademik kebijakan pendidikan terkait. Sumber sekunder terdiri atas artikel ilmiah, buku referensi, laporan lembaga penelitian, serta dokumen digital dari situs resmi pemerintah dan organisasi pendidikan (Mursalin, Mu'ti, and Amirrachman 2024). Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan pencatatan tematik, di mana informasi yang relevan disusun berdasarkan tema: kebijakan, teori, problematika, dan solusi pendidikan multikultural. Tahapan analisis dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu membaca secara cermat, mengklasifikasikan data berdasarkan kategori tertentu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan keterkaitan antar-tema. Dalam proses ini, penulis juga menggunakan pendekatan interpretatif untuk memahami konteks sosiokultural dari teks-teks yang dianalisis. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis agar hasilnya tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga argumentatif (Aisyah, Hanum, and Daulay 2024). Dengan tahapan ini, diharapkan Tulisan mampu menyajikan pembahasan yang komprehensif dan kritis terhadap isu pendidikan multikultural dalam sistem pendidikan nasional Indonesia.

RESULTS AND DISCUSSION

Results

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengandung semangat multikultural yang secara implisit tercermin dalam asas keadilan, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini menjadi dasar legal yang memungkinkan pengembangan pendidikan yang menghargai keragaman. Dalam pasal-pasal tertentu, ditegaskan bahwa pendidikan harus menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa, agama, dan keberagaman sosial. Meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah pendidikan multikultural, namun esensinya sangat mendukung penerapan nilai-nilai tersebut dalam praktik pendidikan. Ini memberi peluang besar bagi pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, dan interaksi sosial di sekolah yang bersifat inklusif. Namun, belum ada turunan kebijakan yang benar-benar mengintegrasikan



pendidikan multikultural secara sistemik dalam perangkat pembelajaran. Artinya, meskipun UU Sisdiknas membuka jalan, tetapi implementasinya masih terbatas pada tataran normatif. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme dalam regulasi dan praktik di lapangan.

Dalam pengembangan pendidikan multikultural, terdapat beberapa acuan penting yang bisa digunakan sebagai landasan konseptual. Pertama, prinsip-prinsip HAM dan demokrasi menjadi dasar dalam membentuk ruang pendidikan yang adil dan setara. Kedua, Pancasila sebagai ideologi negara menegaskan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Ketiga, ajaran-ajaran agama di Indonesia pada dasarnya mendorong perdamaian dan penghargaan terhadap sesama. Keempat, pengalaman sejarah bangsa Indonesia dalam menghadapi konflik sosial menjadi pelajaran berharga bahwa keberagaman harus dikelola, bukan diseragamkan. Oleh karena itu, pendidikan multikultural tidak bisa berdiri sendiri tanpa ditopang oleh nilai-nilai luhur yang telah menjadi bagian dari kehidupan bangsa (Amin 2018). Seluruh acuan ini harus terintegrasi dalam kebijakan pendidikan agar dapat membentuk ekosistem sekolah yang inklusif dan damai. Tanpa acuan yang jelas dan konsisten, pendidikan multikultural berpotensi menjadi jargon kosong yang tidak menyentuh ranah praksis.

Problematika pendidikan multikultural di Indonesia mencakup berbagai aspek struktural dan kultural. Secara struktural, kurikulum nasional masih dominan bersifat homogen, belum secara maksimal mengakomodasi keragaman budaya lokal di Indonesia. Secara kultural, masih banyak masyarakat, termasuk tenaga pendidik, yang memiliki persepsi negatif terhadap perbedaan. Hal ini diperparah dengan kurangnya pelatihan guru mengenai pengelolaan kelas multikultural. Selain itu, buku teks pelajaran juga seringkali tidak mencerminkan kekayaan budaya nusantara secara proporsional. Di sisi lain, regulasi pemerintah pusat belum memberikan pedoman teknis yang komprehensif mengenai pelaksanaan pendidikan multikultural. Akibatnya, sekolah-sekolah cenderung mengabaikan pendekatan ini karena tidak menjadi indikator penilaian dalam akreditasi atau evaluasi (Sutjipto 2017). Semua ini menunjukkan bahwa tantangan pendidikan multikultural di Indonesia bersifat sistemik dan memerlukan pembenahan menyeluruh, baik dari aspek regulasi, sumber daya manusia, maupun budaya organisasi sekolah.

Salah satu problem paling mendasar dalam pengembangan pendidikan multikultural adalah resistensi dari masyarakat yang masih



memandang keberagaman sebagai potensi konflik. Hal ini terlihat dari maraknya intoleransi antarumat beragama, kekerasan berbasis identitas, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas di sekolah-sekolah. Dalam beberapa kasus, siswa dari latar belakang agama atau suku tertentu mengalami perlakuan tidak adil, baik oleh teman sebaya maupun tenaga pendidik (Hanafy 2015). Fenomena ini menandakan bahwa pendidikan belum mampu menjadi ruang penyemaian nilai-nilai toleransi secara efektif. Hal ini diperparah dengan lingkungan sosial yang mendukung narasi-narasi eksklusif dan monokultural. Oleh karena itu, pendidikan multikultural harus diposisikan sebagai bagian dari strategi nasional untuk meredam konflik sosial dan membangun kohesi bangsa. Ini membutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam mengarusutamakan nilai-nilai keberagaman dalam kehidupan sehari-hari.

Di beberapa daerah, telah muncul inisiatif-inisiatif lokal yang cukup berhasil dalam mengembangkan model pendidikan multikultural. Misalnya, beberapa sekolah di Papua, Yogyakarta, dan Bali telah menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis budaya lokal. Guru tidak hanya mengajarkan materi formal, tetapi juga mengenalkan nilai-nilai budaya setempat, bahasa daerah, serta praktik toleransi antarumat beragama. Di sekolah-sekolah ini, siswa diajak berdiskusi tentang isu-isu sosial dan budaya yang aktual dalam lingkungan mereka. Model seperti ini terbukti efektif dalam membangun empati, solidaritas, dan sikap saling menghormati di antara siswa. Inisiatif ini membuktikan bahwa pendidikan multikultural dapat berhasil apabila didukung oleh kepemimpinan sekolah yang progresif, pelatihan guru yang memadai, serta keterlibatan masyarakat. Namun, upaya ini masih bersifat sporadis dan belum menjadi bagian dari kebijakan pendidikan nasional secara menyeluruh.

Kurikulum yang inklusif menjadi kunci utama dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural. Kurikulum tidak hanya harus mencerminkan keberagaman secara tematik, tetapi juga harus mendorong siswa untuk aktif berpikir kritis terhadap isu-isu sosial di sekitarnya. Saat ini, masih banyak kurikulum yang bersifat normatif dan tidak membuka ruang dialog antarbudaya secara mendalam. Selain itu, penilaian akademik masih terlalu fokus pada aspek kognitif, sementara aspek afektif dan sosial kurang diperhatikan. Kurikulum ideal seharusnya mendorong pengembangan karakter toleran, kemampuan komunikasi lintas budaya, serta empati sosial (Suniti 2014). Dalam hal ini, pendidikan



multikultural bukan hanya tentang apa yang diajarkan, tetapi juga bagaimana cara mengajarkannya. Guru perlu menggunakan pendekatan pedagogis yang demokratis, interaktif, dan kontekstual agar siswa dapat mengalami langsung nilai-nilai multikultural dalam proses belajar.

Peran guru dalam pendidikan multikultural sangat krusial karena mereka adalah aktor utama yang menerjemahkan nilai-nilai multikultural dalam proses pembelajaran. Sayangnya, banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan khusus terkait pendekatan multikultural dalam pembelajaran. Hal ini menyebabkan banyak guru masih menggunakan pendekatan konvensional yang kurang sensitif terhadap latar belakang budaya siswa. Beberapa guru bahkan tidak menyadari bias yang mereka miliki, sehingga tanpa sengaja memperkuat stereotip atau prasangka dalam interaksi kelas (Arfa and Lasaiba 2022). Untuk mengatasi ini, diperlukan program pelatihan guru yang berfokus pada kesadaran budaya (*cultural awareness*), manajemen kelas multikultural, serta strategi pengajaran inklusif. Guru yang memiliki kompetensi multikultural mampu menciptakan lingkungan kelas yang aman, inklusif, dan membangun. Oleh karena itu, peningkatan kualitas guru menjadi investasi jangka panjang dalam penguatan pendidikan multikultural.

Pengembangan pendidikan multikultural juga memerlukan dukungan dari sistem evaluasi dan akreditasi pendidikan yang relevan. Saat ini, indikator keberhasilan pendidikan lebih banyak diukur dari hasil akademik siswa semata. Aspek-aspek sosial seperti toleransi, solidaritas, atau sikap antikekerasan belum menjadi bagian penting dalam sistem penilaian pendidikan nasional (Bempa and Pido 2020). Padahal, pendidikan yang berhasil adalah yang mampu mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga dewasa secara sosial dan emosional. Untuk itu, sistem evaluasi harus mulai mempertimbangkan indikator-indikator multikultural dalam menilai keberhasilan sekolah dan siswa. Ini mencakup sikap terhadap keberagaman, keterlibatan dalam kegiatan sosial lintas budaya, serta kemampuan berkomunikasi secara empatik (Ibrahim 2013). Dengan demikian, sistem penilaian dapat mendorong sekolah untuk lebih serius mengembangkan pendidikan multikultural.

Penerapan teknologi dan media juga dapat menjadi sarana strategis dalam mendukung pendidikan multikultural. Platform digital seperti video pembelajaran, media sosial, hingga game edukatif bisa digunakan untuk memperkenalkan nilai-nilai kebhinekaan secara kreatif dan menyenangkan.



Saat ini, sebagian besar generasi muda hidup dalam dunia digital yang sangat dinamis (Lathief, Arifah, and Anbiya 2024). Maka, konten pendidikan multikultural harus mampu menyesuaikan diri dengan cara belajar generasi digital tersebut. Misalnya, penggunaan film dokumenter tentang budaya Indonesia, pembuatan proyek kolaboratif lintas sekolah, atau penggunaan media interaktif untuk mendiskusikan isu sosial (Danurahman, Prasetyo, and Hermawan 2021). Teknologi bisa menjadi jembatan untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan solidaritas lintas budaya sejak dini. Namun, penggunaan teknologi ini harus disertai dengan kurasi konten yang tepat dan panduan etika digital agar tidak menimbulkan efek negatif (Nabila et al. 2018). Dengan strategi yang tepat, media digital dapat memperkuat nilai-nilai multikultural di era global.

Discussion

Hasil kajian menunjukkan bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 telah memberikan ruang bagi pengembangan pendidikan multikultural, meskipun belum secara eksplisit menyebut istilah tersebut. Ketiadaan istilah tidak mengurangi esensi bahwa nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keberagaman telah menjadi roh dalam regulasi pendidikan nasional. Namun, ketiadaan regulasi turunan yang lebih operasional menyebabkan penerapannya di tingkat institusi pendidikan berjalan tidak maksimal. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun dasar normatif telah tersedia, namun kebijakan turunan dan implementasi teknis masih belum sistematis. Dalam konteks ini, pendidikan multikultural masih berada pada tataran wacana dan belum sepenuhnya menjadi strategi pendidikan nasional (Salman, U, and Usman 2023). Maka, perlu ada *political will* dari pemangku kebijakan untuk merumuskan aturan teknis yang dapat diterapkan oleh sekolah-sekolah secara konkret. Jika tidak, pendidikan multikultural hanya akan menjadi idealisme kosong tanpa makna praksis.

Integrasi pendidikan multikultural membutuhkan sinergi berbagai aspek: kebijakan pendidikan, kurikulum, kompetensi pendidik, serta peran masyarakat. Saat ini, pelaksanaan pendidikan multikultural masih sangat bergantung pada inisiatif lokal dari masing-masing sekolah atau daerah. Kurangnya acuan nasional membuat pendekatan ini tidak merata dan belum menjadi bagian dari sistem pendidikan yang terstruktur. Misalnya, sekolah-sekolah di kota besar cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap pelatihan guru atau materi pembelajaran multikultural, sedangkan di daerah



terpencil masih sangat terbatas. Maka dari itu, perlu ada kebijakan nasional yang memberikan kerangka kerja, standar implementasi, dan indikator evaluasi pendidikan multikultural. Dengan cara ini, seluruh satuan pendidikan memiliki arah dan pedoman yang sama, sehingga tidak terjadi kesenjangan praksis antarwilayah (Oktia et al. 2023).

Salah satu temuan penting adalah masih adanya bias kultural dalam materi ajar dan interaksi kelas. Banyak guru yang tidak sadar membawa stereotip dan prasangka dalam pembelajaran. Misalnya, penggambaran budaya tertentu secara dominan dalam buku teks dapat membentuk persepsi bahwa budaya lain kurang penting. Selain itu, penggunaan bahasa dan ilustrasi yang homogen mencerminkan bahwa keragaman belum dianggap sebagai kekuatan, melainkan sebagai perbedaan yang harus diseragamkan. Untuk mengatasi ini, pendidikan guru harus dilengkapi dengan pelatihan multikultural yang berorientasi pada refleksi kritis. Guru harus mampu mengidentifikasi biasnya sendiri serta memahami konteks sosial dan budaya peserta didiknya. Pelatihan ini tidak cukup sekali, tetapi harus menjadi bagian dari pengembangan profesional berkelanjutan agar mampu menumbuhkan kepekaan budaya yang mendalam.

Kurikulum yang responsif terhadap keberagaman menjadi kunci penting dalam keberhasilan pendidikan multikultural. Namun kenyataannya, kurikulum nasional masih cenderung menekankan pada aspek kognitif dan belum sepenuhnya memberi ruang pada pembelajaran afektif dan sosial. Untuk mengatasi ini, dibutuhkan desain kurikulum yang mengintegrasikan tema-tema keberagaman, hak asasi manusia, dan keadilan sosial ke dalam seluruh mata pelajaran, bukan hanya pada pelajaran PPKn atau agama. Penguatan ini perlu dilakukan secara holistik, termasuk metode pengajaran, evaluasi, dan kegiatan ekstrakurikuler. Kurikulum yang baik bukan hanya memberikan pengetahuan tentang perbedaan, tetapi juga menumbuhkan kemampuan hidup berdampingan dalam perbedaan tersebut. Maka, pendidikan multikultural harus menjadi pendekatan lintas mata pelajaran dan terintegrasi dalam seluruh aspek pendidikan (Sumilat and Tuwaidan 2024).

Teknologi dan media digital dapat menjadi sarana revolusioner dalam pendidikan multikultural jika digunakan secara tepat. Generasi muda saat ini hidup dalam era digital, sehingga pendekatan pembelajaran yang konvensional sering kali dianggap membosankan (Agustian 2022). Penggunaan media interaktif, konten video edukatif, serta proyek kolaboratif



lintas budaya dapat mendorong siswa memahami realitas keberagaman secara nyata dan kontekstual. Selain itu, platform digital dapat menjadi ruang alternatif untuk membangun komunitas lintas suku, agama, dan budaya. Namun, penggunaan teknologi ini harus disertai dengan pendidikan literasi digital agar siswa tidak terjebak pada konten-konten yang bersifat provokatif atau diskriminatif. Guru dan sekolah harus aktif mengkurasi serta mengarahkan penggunaan media digital dalam konteks pendidikan multikultural. Jika dikelola dengan benar, teknologi akan memperluas cakrawala pemahaman dan pengalaman siswa terhadap kehidupan dalam masyarakat yang plural (Sukarman, Raharjo, and Syukur 2019).

Implikasi dari hasil kajian ini menunjukkan bahwa pendidikan multikultural di Indonesia membutuhkan pendekatan yang lebih strategis dan sistematis. Tidak cukup hanya dengan mengandalkan kesadaran guru atau kearifan lokal semata, tetapi perlu ada kebijakan afirmatif dari negara. Pendidikan multikultural harus menjadi bagian dari rencana strategis pendidikan nasional, termasuk dalam penganggaran, kurikulum, pelatihan guru, hingga evaluasi sekolah. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dan keluarga dalam membentuk nilai-nilai toleransi sejak dini. Pendidikan multikultural bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi merupakan proyek kolektif bangsa untuk memastikan keberagaman menjadi kekuatan, bukan sumber konflik. Oleh karena itu, kolaborasi antar-pemangku kepentingan menjadi kunci sukses dari transformasi pendidikan yang benar-benar inklusif dan multikultural.

KESIMPULAN

Penulisan ini menunjukkan bahwa pendidikan multikultural merupakan kebutuhan mendesak dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Meskipun secara normatif Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 telah membuka ruang untuk pengembangan nilai-nilai multikultural, implementasinya masih jauh dari harapan. Tantangan seperti bias budaya dalam kurikulum, kurangnya pelatihan guru, dan minimnya kebijakan teknis telah menghambat praktik pendidikan yang inklusif. Selain itu, belum adanya indikator penilaian multikultural dalam sistem evaluasi pendidikan membuat sekolah-sekolah enggan untuk menerapkannya secara serius. Temuan-temuan ini menggarisbawahi perlunya integrasi nilai-nilai multikultural secara sistemik dan berkelanjutan dalam seluruh aspek pendidikan. Baik dari sisi regulasi, kurikulum, kompetensi guru, maupun



metode pembelajaran, semuanya harus diarahkan pada penguatan nilai-nilai keberagaman, toleransi, dan keadilan sosial. Jika pendidikan nasional ingin mencetak generasi yang tangguh secara intelektual sekaligus matang secara sosial, maka pendidikan multikultural harus dijadikan sebagai fondasi utama dalam proses pembelajaran.

Kekuatan utama dari Tulisan ini terletak pada pendekatannya yang holistik dalam membahas pendidikan multikultural dari berbagai aspek; mulai dari landasan normatif, problematika praktis, hingga strategi implementatif. Pendekatan ini didukung oleh studi pustaka yang luas, yang mencakup literatur akademik, regulasi formal, hingga praktik-praktik lokal di lapangan. Hal ini memungkinkan pembaca mendapatkan gambaran yang utuh dan kontekstual mengenai tantangan serta potensi pendidikan multikultural di Indonesia. Selain itu, struktur Tulisan yang sistematis memudahkan pembaca untuk memahami alur argumen dan keterkaitan antarbagian. Analisis yang disajikan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga kritis dan reflektif, sehingga mendorong pembaca untuk berpikir lebih dalam mengenai realitas sosial yang dihadapi dunia pendidikan. Dengan demikian, Tulisan ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menjadi bahan refleksi dan advokasi bagi para pemangku kepentingan pendidikan.

Namun demikian, penulisan Tulisan ini juga memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui. Keterbatasan utama terletak pada keterbatasan data empiris yang bersifat langsung dari lapangan. Karena Tulisan ini disusun berdasarkan studi pustaka, maka aspek kontekstual dari sekolah-sekolah tertentu belum tergambarkan secara mendalam. Selain itu, keterbatasan ruang dan waktu juga membuat pembahasan terhadap isu-isu pendidikan multikultural di daerah-daerah tertentu tidak dapat dieksplorasi lebih luas. Beberapa perspektif seperti pendekatan psikologis siswa atau kajian sosiologis komunitas sekolah juga belum tersentuh secara komprehensif. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian lanjutan yang berbasis lapangan untuk memperkaya temuan dalam Tulisan ini. Penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi, misalnya, dapat menjadi metode yang tepat untuk mendalami praktik-praktik pendidikan multikultural secara lebih nyata dan mendalam di berbagai wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

200



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

1. Agustian, Murniati. 2022. Model Pembelajaran Multikultural Berbasis Refleksi Di Era Digital. *Antroposen: Journal of Social Studies and Humaniora* 1(2):82–91. doi: 10.33830/antroposen.v1i2.4025.
2. Aisyah, Alma'rifatul, Latifah Hanum, and Siti Yusrona Daulay. 2024. Analisis Implementasi Pendidikan Multikulturalisme Dan Tantangan Keragaman Di Sekolah Menengah Atas. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling* 9(2):256–68. doi: 10.23916/085117011.
3. Amin, Muh. 2018. Pendidikan Multikultural. *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 09(1):24–34.
4. Arfa, Arman Man, and Djamila Lasaiba. 2022. Pendidikan Multikultural Dan Implementasinya Di Dunia Pendidikan. *GEOFORUM. Jurnal Geografi Dan Pendidikan Geografi* 1(2):111–25. doi: 10.30598/geoforumvol1iss2pp111-125.
5. Bećirović, Senad, and Damir Bešlija. 2018. Classroom as a Microcosm: Teaching Culturally Diverse Students. *Journal of Education and Humanities* 1(1):12–20. doi: 10.14706/jeh2018112.
6. Bempa, Manti S., and Asiah T. Pido. 2020. Evaluasi Sistem Pendidikan Multikultural Dalam Pengembangan Diri Peserta Didik Di SMP Negeri 1 Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner* 5(1):77–98.
7. Danurahman, Jeni, Danang Prasetyo, and Hendra Hermawan. 2021. Kajian Pendidikan Multikultural Di Era Digital. *Jurnal Kalacakra* 2(1):8–19. doi: 10.31002/kalacakra.v2i1.3515.
8. Hanafy, Muh. Sain. 2015. Pendidikan Multikultural Dan Dinamika Ruang Kebangsaan. *Jurnal Diskursus Islam* 3(1):119–39.
9. Ibrahim, Rustam. 2013. PENDIDIKAN MULTIKULTURAL: Pengertian, Prinsip, Dan Relevansinya Dengan Tujuan Pendidikan Islam. *Addin* 7(1):129–54.
10. Khair, Miftahul, Muhammad Tang, and Muslim Mubarak. 2024. Peserta Didik Yang Berwawasan Multikultural: Studi Literatur. *EDUCATIONAL: Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Pengajaran* 4(2):51–59.
11. Lathief, Auliya Syahda Al, Alfina Rohmanina Arifah, and Bakti Fatwa Anbiya. 2024. Building Diversity in the Digital Age: The Role of Social Media Platforms in Raising Multicultural Awareness.
12. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)* 1(2):1008–19. doi: 10.62567/micjo.v1i2.



13. Mursalin, Hisan, Abdul Mu'ti, and R. Alpha Amirrachman. 2024. Pendidikan Multikultural Dalam Perspektif Islam. *Rayah Al-Islam* 8(2):617-35. doi: 10.36671/mumtaz.v1i2.12.
14. Nabila, Aisyah Nu'ma, Nur'Aini Zahro, Al-A'raaf Wira Adli, Indah Kusumaningtyas, and Arif Rahman. 2018. Era Digital Dan Tantangan Multikultural Di Indonesia. *ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi PAI* 20-27.
15. Nawangsih, Elok, Sabarudin Sabarudin, Mirzon Daheri, and Eviliani Eviliani. 2022. Pendidikan Multikultural Di Perguruan Tinggi. *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan* 4(4):5727-33. doi: 10.31004/edukatif.v4i4.3378.
16. Nuraini, Febritesna. 2020. *MODUL PENDIDIKAN MULTIKULTURAL*. Universitas Ahmad Dahlan.
17. Nurasmawi, Nurasmawi, and Ristiliana Ristiliana. 2021. *PENDIDIKAN MULTIKULTURAL*. Cetakan Pe. Pekanbaru: CV. Asa Riau.
18. Oktia, Reni, Nur Intan Komala Sari, Isrina Siregar, and Budi Purnomo. 2023. Analisis Konsep Dan Implementasi Pendidikan Multikultural Dalam Pembelajaran Di Indonesia. *KRINOK: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Sejarah FKIP Universitas Jambi* 2(3):92-104. doi: 10.22437/krinok.v2i3.25607.
19. Praditya, Arga Dwi, and Moch. Iqbal. 2024. Dinamika Pendidikan Multikultural: Sintesis Perspektif Teoritis. *Semantik: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Budaya* 2(2):22-31.
20. Prayoga, Tara. 2022. KONTEKSTUALISASI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL SEBAGAI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Telaah Tafsir Al-Quran Surat Ar-Rum Ayat 22 Dan Al-Hujurat Ayat 11-13). UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.
21. Rahmawati, Roro Kurnia Nofita, and Mufiqur Rahman. 2019. Konsep Pendidikan Multikultural Dalam Menciptakan Sistem Kelembagaan Yang Harmoni. *Akademika* 13(1):39-52. doi: 10.30736/adk.v13i01.135.
22. Rasimin, Rasimin. 2017. Implementasi Model Pembelajaran Multikultural Untuk Meningkatkan Kompetensi Mahasiswa (Studi Pada Mahasiswa PGMI Di IAIN Salatiga). *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 11(1):141-62. doi: 10.18326/infl3.v11i1.141-162.
23. Rizqiyati, Zurni, Riski Kurniawan, Mahfida Inayati, and Zainuddin Syarif. 2024. Pendidikan Multikultural Dalam Undang-Undang Sistem



- Pendidikan Nasional. *Bestari: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 5(2):264–80. doi: 10.1201/9781032622408-13.
24. Salman, Salman, M. Shabir U, and Usman Usman. 2023. Pendidikan Multikultural. *El-Idarah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 9(1):47–52. doi: 10.24252/ip.v6i1.4391.
25. Sipuan, Sipuan, Idi Warsah, Alfauzan Amin, and Adisel Adisel. 2022. Pendekatan Pendidikan Multikultural. *AKSARA: Jurnal Ilmu 15 Pendidikan Nonformal* 8(2):815–30. doi: 10.37905/aksara.8.2.815-830.2022.
26. Sukarman, Sukarman, Raharjo Raharjo, and Fatah Syukur. 2019. Deradikalisasi Agama Di Era Digital Melalui Pendidikan Islam Multikultural. *Journal of Islamic Studies and Humanities* 4(2):171–86. doi: 10.21580/jish.42.4734.
27. Sumilat, Juliana Margareta, and Virginia A. Tuwaidan. 2024. Perkembangan Kurikulum Multikultural Di Sekolah Dasar: Menyongsong Tantangan Global. *Journal on Education* 6(4):22245–53. doi: 10.31004/joe.v6i4.6335.
28. Suniti, Suniti. 2014. Kurikulum Pendidikan Berbasis Multikultural. *Jurnal Eduksos* 3(2):23–44.
29. Sutjipto, Sutjipto. 2017. Implementation of Multicultural Curriculum in Primary School. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 2(1):1–21. doi: 10.24832/jpnk.v2i1.618.
30. Waskito, Tejo, and Miftahur Rohman. 2018. Pendidikan Multikultural Perspektif Al-Quran. *Jurnal Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan* 14(2):29–43. doi: 10.53515/tdjpai.v3i2.61.
31. Yati, Fitri, Jalinus Jalinus, Amril Amril, and Gunawan Santoso. 2022. Peradaban Dan Kebudayaan ; Nilai-Nilai Universal Dalam Pendidikan Multikultural. *Pendidikan Transformatif (Jupetra)* 01(03):173–82.

